Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Jakarta, 30 Nopember 2017

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Dr. Ir.NASRULLAH, M.Sc.
2. Jabatan : DIREKTUR - PAKAN TERNAK - DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3. NHK : 272857
4. Tanggal Pelaporan : 19 Juni 2015, 7 Agustus 2015

II. DATA HARTA

	Status Laporan			
	19 Juni 2015		7 Agustus 2015	
A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	**Rp.**	**1.090.920.000**	**Rp.**	**1.090.920.000**
1. Tanah & Bangunan seluas 166 m2 & 145 m2, di Kota MAKASSAR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009	Rp.	968.814.000	Rp.	968.814.000
2. Tanah & Bangunan seluas 139 m2 & 70 m2, di Kota MAKASSAR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2003	Rp.	122.106.000	Rp.	122.106.000
B. HARTA BERGERAK				
a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	**Rp.**	**200.000.000**	**Rp.**	**200.000.000**
1. Mobil, merk MAZDA BIANTE, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013	Rp.	200.000.000	Rp.	200.000.000

272857	Status Laporan	
	19 Juni 2015	7 Agustus 2015
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	-----	-----
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	-----	-----
C. SURAT BERHARGA	**Rp. 0**	**Rp. 0**
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	**Rp. 38.293.473**	**Rp. 25.953.954**
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 38.293.473	Rp. 25.953.954
E. PIUTANG	**Rp. 0**	**Rp. 0**
TOTAL HARTA (II)	**Rp. 1.329.213.473**	**Rp. 1.316.873.954**
III. HUTANG	**Rp. 1.073.495.084**	**Rp. 1.073.495.084**
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG	Rp. 1.073.495.084	Rp. 1.073.495.084
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	**Rp. 255.718.389**	**Rp. 243.378.870**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis